



Tinjauan Terhadap Beban Administrasi Badan Pertanahan Nasional: Efisiensi dan Inovasi dalam Peningkatan Kinerja

¹Michael Adi Nugraha, ²Maulana Noer Aziz

^{1,2} Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 05 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 19 Juni 2024

The National Land Agency (BPN) plays a crucial role in managing land aspects at the national level. In recent years, optimizing BPN's administrative burden has become a major focus for improving the performance of land sector organizations. High administrative burdens can be an obstacle, especially in achieving organizational goals and improving the quality of services to the community. This article discusses how in-depth insight into the administrative burden of BPN is in the context of policy and strategy development. The adoption of information and geospatial technology was identified as a potential solution to increase efficiency and accuracy in land data management and enable administrative processes. Demands for transparency will increasingly become a focus, with the hope that open information can increase public trust in BPN policies.

Keywords: *National Land Agency, administrative burden, efficiency, innovation, land management.*

(*) Corresponding Author: michaeladi@students.unnes.ac.id

How to Cite: Nugraha, M. A., & Aziz, M. N. (2024). Tinjauan Terhadap Beban Administrasi Badan Pertanahan Nasional: Efisiensi dan Inovasi dalam Peningkatan Kinerja. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12537166>

PENDAHULUAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran yang krusial dalam mengelola dan mengatur aspek pertanahan di tingkat nasional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan pertanahan, BPN memiliki beragam tugas dan tanggung jawab, termasuk administrasi yang membutuhkan efisiensi dan inovasi. Beban administratif yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu optimalisasi beban administrasi telah menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi sektor pertanahan. Efisiensi administrasi bukan hanya menjadi isu operasional, tetapi juga mempengaruhi daya saing dan kemampuan lembaga untuk beradaptasi dengan perkembangan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, tinjauan mendalam terhadap beban administrasi Badan Pertanahan Nasional menjadi penting dalam konteks pengembangan kebijakan dan strategi.

Penting untuk memahami bahwa perubahan dalam administrasi di BPN tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan transformasi organisasional secara menyeluruh. Inovasi dalam manajemen administrasi diharapkan dapat membuka pintu menuju peningkatan kinerja, pelayanan yang lebih efektif, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengelola dan mengawasi aset tanah negara memiliki urgensi yang sangat besar. Keberlangsungan efisiensi operasional dan penerapan inovasi untuk meningkatkan

kinerja BPN menjadi sebuah keharusan, terutama mengingat perubahan dinamika masyarakat, perkembangan teknologi, dan kompleksitas tuntutan pemerintah.

Dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan tanah, pertumbuhan populasi dan urbanisasi menjadi pendorong utama yang meningkatkan tekanan terhadap tata kelola tanah. Tantangan serius juga muncul dari kepemilikan tanah yang tidak jelas dan timbulnya konflik lahan, hal ini memerlukan perhatian serius. Selain itu, beban administratif yang tinggi juga menjadi hambatan signifikan. Proses pendaftaran tanah yang rumit dan manual bukan hanya menyebabkan beban administratif yang berat, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Oleh karena itu, adopsi teknologi, terutama melalui penggunaan teknologi informasi dan geospasial, menjadi solusi potensial untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data tanah serta menyederhanakan proses administratif. Tuntutan akan transparansi semakin menjadi fokus utama, dengan masyarakat yang menekankan kebutuhan akan pelayanan yang cepat dan dapat dipercaya dari BPN. Diharapkan bahwa keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh BPN.

Dalam pembangunan nasional, BPN memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Dukungan terhadap program reforma agraria dan investasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kontribusi BPN terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Peningkatan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial menuntut manajemen tanah yang efisien dan adil, mengharuskan BPN untuk terus berinovasi guna mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui pemahaman mendalam terhadap tantangan administratif yang dihadapi dan pertimbangan terhadap solusi inovatif yang mungkin, BPN dapat memperkuat kinerjanya. Dengan demikian, BPN dapat menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mengatasi kompleksitas tuntutan pembangunan nasional.¹

Banyak perkara yang mencapai Pengadilan dan seringkali tidak memperoleh kepuasan disebabkan oleh keputusan Pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau "niet ontvankelijke verklaard," yang umumnya disebut sebagai "NO." Hal ini terjadi karena penggugat mengajukan gugatan yang tidak lengkap terkait dengan letak dan ukuran tanah, serta batas-batas tanah yang digugat yang masih kabur atau tidak jelas. Selain itu, gugatan juga dapat dinyatakan tidak dapat diterima jika penggugat hanya menggugat pihak yang menguasai tanah tanpa memasukkan orang yang memberikan tanah tersebut kepada tergugat, yang pada akhirnya tidak diikutsertakan dalam perkara. Upaya hukum yang dapat diambil terhadap keputusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah dengan mengajukan gugatan kembali. Namun, terkadang pihak penggugat memilih untuk tidak melibatkan diri dalam upaya hukum tersebut dan lebih memilih mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, terutama jika mereka yakin bahwa gugatan mereka sudah jelas dan cukup pihak.² Meskipun langkah-langkah hukum ini kadang-kadang berhasil, di mana Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan banding atau Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi membatalkan keputusan atau gugatan yang tidak dapat diterima (NO), namun tidak jarang juga terjadi

¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia, 2009). hlm. 62

² Syafruddin Kalo, "Aspek dan Implikasi Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Penertiban Sertifikat Hak-Hak atas Tanah". www.hukumonline.com. akses internet tanggal 28 november 2023

bahwa Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO). Dampaknya adalah banyaknya perkara pertanahan yang terus berlanjut selama puluhan tahun tanpa pernah selesai, mengakibatkan penyelesaian perkara pertanahan menjadi terhambat dan berlarut-larut. Dalam beberapa kasus, seorang penggugat mungkin berhasil "memenangkan" gugatannya, di mana permohonan banding dan kasasi dari tergugat ditolak. Namun, kendala muncul ketika mengajukan eksekusi terhadap putusan yang memenangkan gugatan tersebut, karena situasi di lapangan membuat pelaksanaan eksekusi menjadi tidak mungkin dilakukan. Hal ini terjadi karena tanah yang akan dieksekusi dihuni oleh banyak orang, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam gugatan. Sebagai hasilnya, ketika penggugat mengajukan permohonan eksekusi, Pengadilan menyatakan bahwa putusan yang memenangkan gugatan tidak dapat dieksekusi (non-executable), sehingga penggugat hanya meraih kemenangan secara hukum dalam putusan, namun tidak dapat menguasai tanah yang digugatnya secara efektif.³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode kualitatif lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam dan deskriptif tentang fenomena yang diteliti dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang fleksibel dan sesuai konteks, sehingga menghasilkan lebih kompleks, komprehensif, dan tangkapan data kontekstual.

Metode kualitatif yang kami gunakan untuk mempelajari terkait Beban Administrasi pada Badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui bagaimana efisiensi dalam peningkatan kinerja BPN, dengan fokus pada pemahaman dan deskripsi yang komprehensif dan kontekstual tentang Beban Administrasi dengan efisien serta inovatif dalam meningkatkan kinerja lembaga tersebut. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif tentang koperasi antara lain:

1. Wawancara: Teknik wawancara dapat digunakan untuk memperoleh pandangan dan pengalaman dari pihak yang pernah dilibatkan
2. Pengamatan: Teknik pengamatan dapat digunakan untuk mengamati kegiatan dan proses dalam peningkatan efisiensi dan hal yang inovatif
3. Dokumen: Teknik analisis dokumen dapat digunakan untuk memeriksa dokumen yang berkaitan dengan beban administrasi pada Badan Pertanahan Nasional
4. Studi kasus: Teknik studi kasus dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana hal inovatif tersebut dapat digunakan dengan efisien dan efektif

Dengan demikian, penelitian kualitatif tentang beban administrasi pada BPN untuk peningkatan efisiensi dan dapat memberikan inovasi memberikan pemahaman yang mendalam dan deskriptif tentang BPN

³ Philipus M. Hadjon, *Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, (Surabaya : CopyPerc&stencil Jumali, 1985), hlm. 65

PEMBAHASAN

Tugas - Tugas Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas di bidang pertanahan. Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden⁴. Administrasi pertanahan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, mulai dari inventarisasi, pendaftaran, penetapan hak, pemberian hak, dan pemeliharaan hak atas tanah. Secara lebih rinci, tugas BPN meliputi hal-hal berikut:

- Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. BPN bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang pertanahan, baik yang bersifat nasional, regional, maupun lokal. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan di bidang pendaftaran tanah, penetapan hak atas tanah, pemberian hak atas tanah, dan pemeliharaan hak atas tanah.
- Pengelolaan administrasi pertanahan. BPN bertugas mengelola administrasi pertanahan, mulai dari inventarisasi, pendaftaran, penetapan hak, pemberian hak, dan pemeliharaan hak atas tanah. Kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.
- Penyelesaian sengketa pertanahan. BPN bertugas menyelesaikan sengketa pertanahan secara adil dan bijaksana, baik secara nonlitigasi maupun litigasi.
- Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. BPN bertugas memberdayakan masyarakat dengan pertanahan, baik dalam hal pemahaman tentang pertanahan maupun dalam hal pemanfaatan tanah.
- Pengembangan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. BPN bertugas mengembangkan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
- Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. BPN bertugas mengembangkan sumber daya manusia di bidang pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

Volume dan Kompleksitas Beban Administrasi BPN

Volume dan kompleksitas beban administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangatlah besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Luas wilayah Indonesia yang sangat luas, sehingga jumlah objek tanah yang harus diadministrasikan juga sangat besar. Luas wilayah Indonesia mencapai 191.977.040 kilometer persegi, yang terdiri dari daratan dan lautan. Jumlah objek tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 80 juta objek.

⁴ Oe, Meita D. "Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah." *Pranata Hukum*, vol. 10, no. 1, 31 Jan. 2015.

- Keragaman kondisi geografis dan sosial budaya di Indonesia, yang menyebabkan perbedaan pola penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah. Keragaman kondisi geografis di Indonesia meliputi pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pesisir. Keragaman kondisi sosial budaya di Indonesia meliputi suku bangsa, agama, dan adat istiadat.
- Kompleksitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah, yang mengharuskan BPN untuk memahami dan menerapkannya secara benar. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah di Indonesia sangatlah kompleks dan terus berkembang dari waktu ke waktu.

Volume beban administrasi BPN dapat dilihat dari jumlah permohonan yang diterima oleh BPN setiap tahunnya. Pada tahun 2022, BPN menerima sebanyak 11,4 juta permohonan, yang terdiri dari permohonan pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah, dan lain-lain. Jumlah permohonan ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kompleksitas beban administrasi BPN dapat dilihat dari jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BPN. BPN memberikan berbagai jenis pelayanan, mulai dari pelayanan pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah, pendaftaran hak tanggungan, hingga pendaftaran hak guna usaha. Masing-masing jenis pelayanan memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda-beda, yang harus dipahami dan dipatuhi oleh pemohon.

Volume dan kompleksitas beban administrasi BPN yang besar ini menjadi tantangan bagi BPN untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. BPN terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi pertanahan.

Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh BPN untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menangani volume dan kompleksitas beban administrasi:

- Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) BPN. BPN terus melakukan rekrutmen dan pelatihan bagi SDM-nya, agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Memperkuat sistem dan prosedur administrasi pertanahan. BPN terus melakukan pengembangan sistem dan prosedur administrasi pertanahan, agar lebih efisien dan efektif.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). BPN terus memanfaatkan TIK dalam proses administrasi pertanahan, agar lebih cepat dan akurat.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu BPN untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat.

Penulis melakukan wawancara di kantor BPN Jawa Tengah dan mendapatkan informasi bahwasanya Volume/Tugas BPN itu sendiri cukup banyak yang akan Penulis rangkum dibawah ini beserta kompleksitas nya:

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pertanahan:

Volume: BPN bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan di bidang pertanahan, baik yang bersifat nasional, regional, maupun lokal. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan, hukum, dan kebutuhan masyarakat terkait tanah.

Kompleksitas: Penyusunan kebijakan pertanahan melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika hukum tanah, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ekonomi. Proses ini juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

Pengelolaan Administrasi Pertanahan:

Volume: Mengelola administrasi pertanahan mencakup serangkaian kegiatan, mulai dari inventarisasi tanah, pendaftaran, penetapan hak, pemberian hak, hingga pemeliharaan hak atas tanah.

Kompleksitas: Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antarunit kerja BPN. Inventarisasi tanah, misalnya, dapat melibatkan survei lapangan yang memerlukan keahlian teknis dan teknologi modern.

Penyelesaian Sengketa Pertanahan:

⁵Volume: Menyelesaikan sengketa pertanahan, baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi, melibatkan penanganan sejumlah kasus yang mungkin bervariasi dalam kompleksitas

Kompleksitas: Proses penyelesaian sengketa membutuhkan keahlian hukum, negosiasi, dan kemampuan mediasi. Pemahaman mendalam terhadap hukum pertanahan diperlukan untuk menjamin keadilan dan kebijaksanaan dalam penyelesaian.

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanahan:

Volume: Memberdayakan masyarakat mencakup edukasi, pelatihan, dan pendampingan dalam pemahaman dan pemanfaatan tanah.

Kompleksitas: Memahami kebutuhan masyarakat, mendesain program edukasi yang efektif, dan memberikan dukungan yang sesuai memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat.

Pengembangan Penelitian dan Pengembangan:

Volume: Mengembangkan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan memerlukan alokasi sumber daya untuk proyek-proyek riset dan inovasi.

Kompleksitas: Proses ini melibatkan identifikasi tren, kebutuhan, dan peluang di bidang pertanahan. Pekerjaan ini juga mencakup kerja sama dengan lembaga riset dan akademisi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Volume: Mengembangkan sumber daya manusia di bidang pertanahan mencakup pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan bagi personel BPN.

Kompleksitas: Membangun kapasitas internal membutuhkan perencanaan strategis, pembuatan kurikulum pelatihan yang relevan, dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebutuhan sumber daya manusia.

Dengan berbagai tugas dan fungsi ini, BPN memerlukan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil, dukungan teknologi yang memadai, dan anggaran yang memadai untuk menjalankan operasionalnya dengan efisien. Pemahaman yang mendalam

⁵ PMN Agraria and T Ruang, "... Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan ..." (... Negara Republik Indonesia Tahun, 2021)

terhadap hukum pertanahan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi kunci dalam menangani volume pekerjaan yang besar ini.

Inovasi Dalam Peningkatan Kinerja BPN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengatur tanah serta ruang di Indonesia. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan kompleksitas tantangan pembangunan, inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi ATR BPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya, terutama dalam hal pelayanan pertanahan. Inovasi-inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan pertanahan. Seperti pada era informasi saat ini, Sistem Informasi Geografis (SIG) telah menjadi alat yang sangat penting dalam modernisasi dan memperbaiki efisiensi dalam proses ini. SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi dan keluaran informasi geografi. Subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan⁶. Dengan kemampuannya untuk menggabungkan informasi geografis dengan teknologi informasi, telah mengubah cara kita memahami dan mengelola tanah. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah yang lama sering kali memakan waktu lama, tidak akurat, dan rentan terhadap konflik kepemilikan tanah. BPN memutuskan untuk memodernisasi sistem ini dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG). Melalui Peta interaktif “BHUMI” yang diluncurkan oleh ATR/BPN, ini mengimplementasikan SIG dengan berbagai langkah sebagai berikut:

Melalui Pemetaan Digital, Mereka memulai dengan membuat pemetaan digital yang akurat dari wilayah tanah mereka. Ini termasuk peta dengan informasi batas-batas tanah, topografi, dan data geografis lainnya.

Integrasi Data kepemilikan tanah dan catatan sejarah tanah digabungkan ke dalam sistem SIG. Ini mencakup informasi tentang kepemilikan lahan, sejarah transaksi, dan informasi hukum yang relevan. Kemudian selanjutnya adalah Pendaftaran Online, dimana pemerintah dapat mengembangkan sistem pendaftaran tanah online yang memungkinkan pemilik tanah untuk mengajukan permintaan pendaftaran tanah secara elektronik. Ini meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi birokrasi.

Analisis Data yang mudah, SIG digunakan untuk menganalisis data kepemilikan tanah, mendeteksi potensi masalah seperti kepemilikan ganda, dan mengirimkan notifikasi kepada pemilik tanah yang terpengaruh. Pengaksesan Publik, Data pendaftaran tanah yang terintegrasi dalam SIG dapat diakses oleh publik melalui platform online. Ini meningkatkan transparansi dan memberi masyarakat kemampuan untuk memverifikasi informasi kepemilikan tanah.

Adapun Hasil dari pengamatan kami terhadap program tersebut adalah sebagai berikut : Dengan implementasi SIG dalam pendaftaran tanah, negara tersebut mencapai sejumlah hasil positif

1. Proses pendaftaran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.
2. Kesalahan manusia dalam pencatatan berkurang secara signifikan.
3. Penipuan dan konflik kepemilikan tanah berkurang.
4. Data kepemilikan tanah menjadi lebih akurat dan mudah diakses.

⁶Aronoff dalam Christofer Apriano Mango. 2019. Pembuatan Sistem Informasi Geografis Peta Bidang Tanah Berbasis Web Mapping. Ringkasan Skripsi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Malang. Malang. Hlm. 7.

5. Pemerintah dapat lebih efisien dalam perencanaan tata guna lahan dan pengembangan wilayah.

Selain itu beberapa (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) PTSL telah banyak menerapkan SIG dalam menjadi bagian dari sistem pendaftaran tanah yang modern. dalam keseluruhan, implementasi SIG telah memodernisasi pendaftaran tanah, mengurangi masalah administratif, dan meningkatkan transparansi dalam proses ini. Hal ini memberikan manfaat besar bagi pemilik tanah, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran utama dalam mengelola dan mengatur tanah di Indonesia, melibatkan berbagai aspek penting seperti penyusunan kebijakan, administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan penelitian dan sumber daya manusia di sektor pertanahan. Sebagai entitas pemerintah yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut, BPN dihadapkan pada tantangan besar berupa volume tinggi dan kompleksitas beban administratif. Indikator yang jelas dari tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan pertanahan terlihat dari volume permohonan administratif BPN, yang mencapai 11,4 juta pada tahun 2022 dan terus meningkat setiap tahunnya. Fakta ini mencerminkan kompleksitas administratif yang semakin terasa, terutama dalam berbagai jenis layanan yang disediakan oleh BPN, yang masing-masing memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda.

⁷Dalam menghadapi tantangan ini, BPN telah melakukan upaya serius, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan ini tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif, mengakui bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat penting untuk menangani tugas-tugas yang kompleks. Selain itu, BPN juga memfokuskan perhatiannya pada penguatan sistem dan prosedur administrasi pertanahan dengan tujuan menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi. Strategi komprehensif BPN melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang diwujudkan melalui inovasi seperti penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pertanahan dengan mempercepat proses pendaftaran tanah, mengurangi kesalahan manusia, menangani penipuan dan konflik kepemilikan tanah, serta meningkatkan transparansi.

Adopsi SIG memungkinkan BPN untuk memanfaatkan informasi spasial dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. SIG membantu dalam pemetaan dan analisis data geografis yang diperlukan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah. Selain itu, SIG juga dapat digunakan untuk memonitor perubahan tanah dan menyediakan informasi akurat terkait kepemilikan tanah. Melalui berbagai upaya ini, BPN berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya agar dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat. Implementasi SIG dan inovasi lainnya telah membawa dampak positif dalam modernisasi pendaftaran tanah dan menanggulangi

⁷ M Pujiyono, "... DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 DI KATOR PERTANAHAN ..." (repository.stpn.ac.id, 2021), <<http://repository.stpn.ac.id/1788/1/Muh.%20Pujiyono.pdf>>

beberapa masalah administratif yang muncul seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan tata guna tanah di Indonesia.

Secara keseluruhan, peran krusial BPN dalam mengelola aspek pertanahan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan sumber daya manusia, perbaikan prosedur administrasi, dan penerapan teknologi. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi, BPN dapat terus memainkan peran vitalnya dalam menjaga ketertiban dan keadilan pertanahan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia, 2009). hlm. 62
- Syafruddin Kalo, "Aspek dan Implikasi Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Penertiban Sertifikat Hak-Hak atas Tanah". www.hukumonline.com. akses internet tanggal 28 november 2023
- Philipus M. Hadjon, *Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, (Surabaya : CopyPerc&stencil Jumali, 1985), hlm. 65
- Oe, Meita D. "Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah." *Pranata Hukum*, vol. 10, no. 1, 31 Jan. 2015.
- Aronoff dalam Christofer Apriano Mango. 2019. *Pembuatan Sistem Informasi Geografis Peta Bidang Tanah Berbasis Web Mapping*. Ringkasan Skripsi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Malang. Malang. Hlm. 7.
- PMN Agraria and T Ruang, "... Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan ..." (... Negara Republik Indonesia Tahun, 2021)
- M Pujiyono, "... DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 DI KATOR PERTANAHAN ..."(repository.stpn.ac.id,2021), <http://repository.stpn.ac.id/1788/1/Muh.%20Pujiyono.pdf>>